

LPMP PROV. JATIM



TAHUN 2016

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Jl. Ketintang Wiyata No. 15 Surabaya
Telp. : (031) 8290243, 8273734,
& Fax : (031) 8273734
Email : lpmpjatim@yahoo.co.id



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. DASAR HUKUM	1
C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1. Tugas Dan Fungsi	2
2. Struktur Organisasi	3
BAB II.....	6
PERJANJIAN KINERJA LPMP PROVINSI JAWA TIMUR.....	6
Perjanjian Kinerja.....	6
BAB III.....	8
AKUNTABILITAS KINERJA LPMP PROVINSI JAWA TIMUR	8
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	8
B. REALISASI ANGGARAN.....	9
BAB IV	13
PENUTUP.....	13

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Jatim dengan Ditjen Dikdasmen
2. Format B19

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkatrahmat-Nya LPMPProvinsi Jawa Timur dapat menyelesaikan Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 sebagai hasil sinergi yang baik antar seluruh tim pelaporan kinerja di lingkungan LPMP Provinsi Jawa Timur.

LAKIP Tahun 2016 merupakan laporan akuntabilitas kinerja tahun kedua periode perencanaan 2015-2019. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP dalam merealisasikan program penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Timur.

Laporan ini menguraikan deskripsi capaian kinerja LPMP Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yang meliputi unit kerja: Seksi Sistem Informasi; Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi; Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan Subbagian Umum.

Melalui laporan ini, LPMP Provinsi Jawa Timur berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja fisik dan kinerja keuangan pada Tahun 2016. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan nasional khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Dengan dukungan dari semua pihak (*stakeholders*) diharapkan LPMP Provinsi Jawa Timur dapat bersama-sama bekerja dengan optimal untuk menghadapi tantangan pembangunan pendidikan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa meridhoi usaha kita. Amin.

Surabaya, Januari 2017

Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Bambang Agus Susetyo, MM, M.Pd.

NIP. 19610817 198303 1 025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Program Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan menginduk pada sasaran strategis dan indikator kinerja LPMP pada Lampiran Renstra Kemdikbud 2015-2019 yang terdiri atas tiga jenis indikator kinerja, yaitu:

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, yang memayungi kegiatan-kegiatan operasional perkantoran, pendataan dan informasi serta kerja sama dan kemitraan di LPMP Provinsi Jawa Timur;
2. Pembinaan penjaminan mutu pendidikan, yang memayungi kegiatan-kegiatan pemetaan mutu pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi Jawa Timur;
3. Peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan, yang memayungi kegiatan-kegiatan supervisi dan fasilitasi pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi Jawa Timur.

Dari penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja LPMP tersebut, dapat digarisbawahi bahwa penetapan tersebut telah sejalan dengan tugas dan fungsi LPMP di provinsi yaitu melakukan pemetaan, supervisi dan fasilitasi serta didukung oleh tugas melaksanakan tata kelola kelembagaan yang handal. Hal tersebut juga selaras dengan visi dan misi LPMP Provinsi Jawa Timur, yang bercita-cita konsisten melaksanakan tugas dan fungsi dengan semangat gotong-royong, menjalin kerja sama/kemitraan dengan baik antara LPMP Provinsi Jawa Timur dengan seluruh stakeholders khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Keuangan yang dialokasikan pemerintah melalui DIPA LPMP Jatim pada tahun anggaran 2016 sebesar 183.139.495.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 172.358.336.491,- atau sebesar 94.11%, hal ini dikarenakan adanya seft blocking sebesar 7.500.000.000,-.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara, untuk itu setiap warga negara berhak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal 31, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang memiliki program utama melaksanakan peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional khususnya di Provinsi Jawa Timur, turut berkontribusi dengan melaksanakan program-program yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional di Indonesia.

Keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan amanat pembangunan pendidikan nasional dilakukan dengan secara tertib dan akurat melakukan pengukuran atas capaian kinerja dari program-program yang dilaksanakan, dimana hasil dari pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan informasi bagi perancangan program-program di tahun berikutnya.

B. DASAR HUKUM

1. Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
2. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Permendikbud No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. Jawa Timur Nomor : 023.03.2.419521/2016 tanggal 7 Desember 2015.

C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Dan Fungsi

Tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Permendikbud No. 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja LPMP,

LPMP Jawa Timur dinyatakan memiliki tugas:

Melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Kesetaraan Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Provinsi

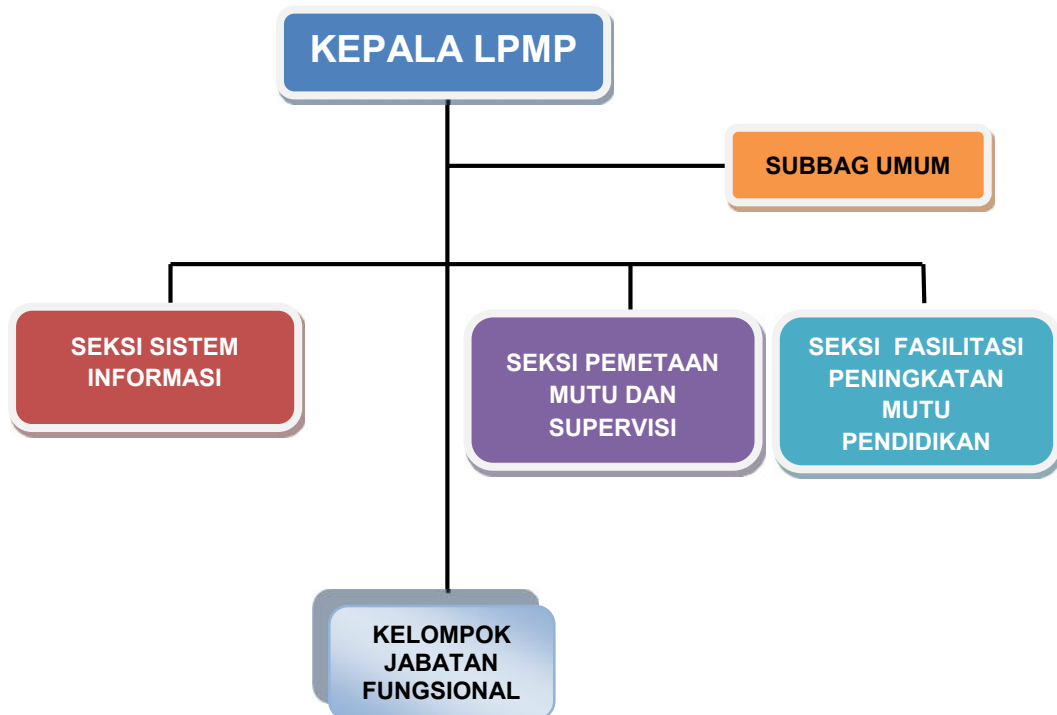
Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
3. Supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional;
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendikbud no. 33 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP Jawa Timur memiliki 1 (Satu) Sub bagian Umum, 3 (Tiga) Seksi ; a. Seksi Informasi, b. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, c. Seksi Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan, dan 1 (Satu) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPMP Jawa Timur



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP dibantu oleh Subbag Umum, tiga Seksi, dan Tenaga Fungsional yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) ***Subbagian Umum***

Subbag Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan ke rumah tanggaan LPMP.

b) ***Seksi Sistem Informasi***

Seksi Program dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah

c) ***Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi***

Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu, dan supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.

d) ***Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan***

Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerjasama peningkatan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menyusun laporan kinerja sebagai salah satu informasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan kinerja lembaga disusun berdasarkan petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja sebagai lembaga pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna melanjutkan tujuan pembangunan pendidikan yang terus berkesinambungan, serta untuk merealisasikan rencana pembangunan yang berfokus pada penguatan pelayanan penjaminan mutu pendidikan, LPMP Provinsi Jawa Timur telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019 dimana layanan penjaminan mutu pendidikan difokuskan pada 3 bidang utama yaitu pemetaan, supervisi dan fasilitasi. Salah satu upaya LPMP Provinsi Jawa Timur dalam pencapaian target kinerja tata kelola kelembagaan yang handal adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang bertujuan memberikan penjelasan tentang:

1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategiselama Tahun 2015;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
3. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Provinsi Jawa Timur.

Secara umum, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ini untuk memenuhi kewajiban UPT dalam penyampaian laporan kerjanya,

berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kemdikbud No. 92024/A2.4/KU/2015. Hal ini sebagai perwujudan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima, karena itu penyusunan laporan kinerja lembaga secara tertib, handal, dan akurat merupakan hal penting yang harus dipenuhi.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA LPMP PROVINSI JAWA TIMUR

Perjanjian Kinerja

Fokus penguatan layanan penjaminan mutu pendidikan 2015-2019 dituangkan dalam sebuah kontrak kerja, berikut dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur bersama Direktur Jenderal Dikdasmen.

Tabel 2.1 Target Capaian

Program: Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk
Seluruh Jenjang Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya	SD, SMP, SMA, SMK	11.038.556.000
	1. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya Output : <i>- Peta Mutu SD Propinsi Jawa Timur</i>	100	
	2. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya Output : <i>- Peta Mutu SMP Propinsi Jawa Timur</i>	100	
	3. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya Output : <i>- Peta Mutu SMA Propinsi Jawa Timur</i>	100	
	4. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya Output : <i>- Peta Mutu SMK Propinsi Jawa Timur</i>	65	
	Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya	29	
	5. Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya Output : <i>- Profil peningkatan indeks efektivitas SD Propinsi Jawa Timur</i>	15	
	6. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya Output :	35	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	- <i>Profil peningkatan indeks efektivitas SMP Propinsi Jawa Timur</i>		
	7. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya Output : - <i>Profil peningkatan indeksefektivitas SMA Propinsi Jawa Timur</i>	35	
	8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya Output : - <i>Profil peningkatan indeks efektivitas SMK Propinsi Jawa Timur</i>	25	
	Persentase Satuan Pendidikan yang telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP	SD, SMP, SMA, SMK	135.041.308.000
	2. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - <i>Laporan hasil fasilitasi SD Propinsi Jawa Timur</i>	25	
	3. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - <i>Laporan hasil fasilitasi SMP Propinsi Jawa Timur</i>	25	
	4. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - <i>Laporan hasil fasilitasi SMA Propinsi Jawa Timur</i>	25	
	5. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - <i>Laporan hasil fasilitasi SMK Propinsi Jawa Timur</i>	25	

Secara keseluruhan jumlah anggaran yang dimasukkan dalam perjanjian Kinerja adalah Rp. 146.079.864.000,- sedangkan jumlah anggaran keseluruhan dalam DIPA LPMP Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebesar Rp183.139.495.000,- (Seratus delapan puluh tiga milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Adapun sisa anggaran yang tidak dimasukkan dalam perjanjian kinerja terkait dengan pembiayaan belanja pegawai dan belanja modal serta sebagian belanja barang untuk dokumen perencanaan, keuangan, ketatausahaan, dan keperluan sehari-hari perkantoran lainnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA LPMP PROVINSI JAWA TIMUR

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2016, LPMP Propinsi Jawa timur berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut dengan melakukan pengukuran capaian kinerja.

Pengukuran kinerja adalah bagian dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan sumber data dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. Dari hasil pengukuran yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi unit kerja.

Dalam pengukuran kinerja LPMP Provinsi Jawa Timur menginduk pada sasaran strategis dan indikator kinerja Ditjen Dikdasmen yang terlampir pada Renstra Kemdikbud 2015-2019. Maka berikut ini akan disajikan output Ditjen Dikdasmen yang terkait dengan sasaran strategis, indikator kinerja dan 10 output LPMP.

Tabel 3.1 sasaran strategis, indikator kinerja dan 10 output LPMP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	10 Output LPMP
1	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pendidikan Dasar dan Menengah	Persentase layanan pengendalian internal yang berfungsi dengan baik	
		Jumlah layanan pelaksanaan dukungan manajemen dan pelaksanaan program pendidikan dasar dan menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Perkantoran 2. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4. Gedung/bangunan
		Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah

		Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan serta koordinasi lintas sektoral bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	1. Dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi, pelaporan, dan ketatausahaan
		Jumlah kerja sama dan kemitraan institusi/instansi dalam dan luar negeri	1. Layanan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan
2	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase SD, SMP, SMA dan SMK yang telah dipetakan mutunya	1. Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya 2. Sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya
3	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase SD, SMP, SMA dan SMK yang telah difasilitasi dalam pencapaian 8 SNP	1. Satuan Pendidikan pada jenis, jenjang, dan jalur pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP

B. REALISASI ANGGARAN

Terkait dengan pengukuran kinerja, selain melakukan pengukuran capaian fisik, lembaga perlu melakukan pengukuran terkait dengan realisasi anggaran. Berikut uraian singkat pengukuran kinerja bagian anggaran.

- Penjelasan realisasi anggaran terkait tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2016 periode dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya, dari pagu 5.027.505.000 terealisasi 4.726.160.100 berkontribusi mencapai daya serap sebesar 94.01%.
 - Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP, dari pagu 135.041.308.000 terealisasi 126.873.881.120 berkontribusi mencapai daya serap sebesar 93.95%.

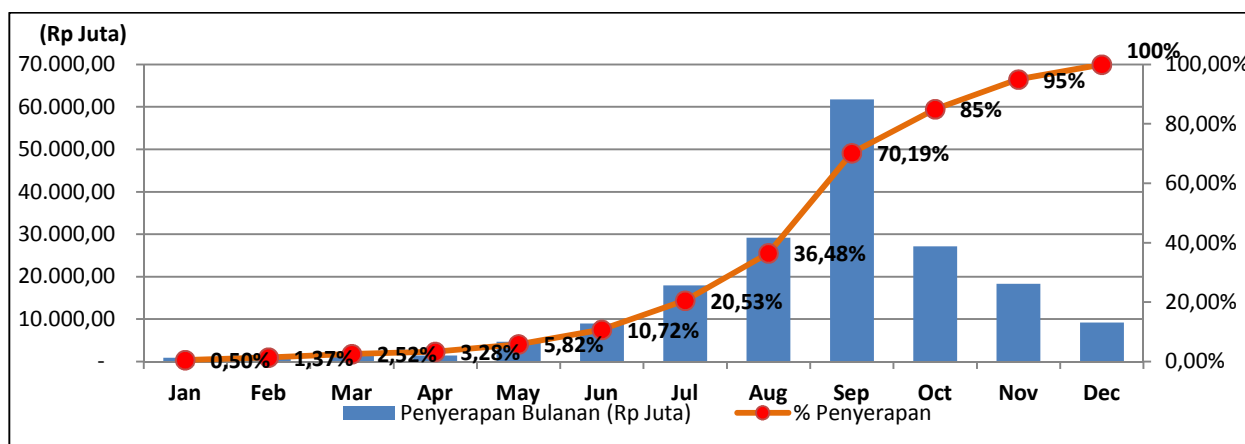
- Sekolah model yang telah dikembangkan mutu pendidikannya, dari pagu 4.407.980.000 terealisasi 4.160.207.900 berkontribusi mencapai daya serap sebesar 94.38%.
- Layanan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan , dari pagu 1.460.781.000 terealisasi 1.329.199.500 berkontribusi mencapai daya serap sebesar 90.99%.
- Data dan informasi mutu pendidikan dasar dan menengah, dari pagu 142.290.000 terealisasi 0. Hal ini dikarenakan kegiatan/pekerjaan yang ada di output ini yang meliputi : desain, pengolahan, dan penyusunan sudah dilaksanakan dan masuk di rekomendasi atau di output Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP, sub output Rekomendasi peningkatan mutu kepada dinas kab./kota/prov./pusat
- Dokumen perencanaan , keuangan, evaluasi, pelaporan dan ketatausahaan, dari pagu 3.276.346.000 terealisasi 3.047.068.550 berkontribusi mencapai daya serap sebesar 93%.
- Layanan perkantoran dari pagu 17.586.934.000 terealisasi 16.058.601.080 berkontribusi mencapai daya serap sebesar 91.31%.
- Perangkat pengolah data dan komunikasi dari pagu 681.000.000 terealisasi 677.875.500 berkontribusi mencapai daya serap sebesar 99.54%.
- Peralatan dan fasilitas perkantoran dari pagu 15.485.351.000 terealisasi 15.485.342.741 berkontribusi mencapai daya serap sebesar 100%.
- Gedung/bangunan, dari pagu 30.000.000 terealisasi 0. Hal ini dikarenakan biaya pengurusan perijinan melebihi pagu yang telah ditetapkan.
- **Adanya selfblocking sebesar 7.500.000.000**

Tabel 3.2 Capaian daya serap fisik dan keuangan dapat disajikan sebagai berikut:

Bulan	Fisik		Keuangan	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Pagu: Rp 135.977.000.000				
Januari	0.5	2	0.58	0.68
Februari	1.37	3	1.37	1.41
Maret	2.5	4	2.52	2.83
April	3.28	6	3.28	4.4
Pagu: Rp 192.021.244.000				
Mei	5.82	13	5.82	11.71
Juni	10.72	21	10.72	18.94
Juli	20.53	45	20.53	42.2
Pagu: Rp 183.139.495.000				
Agustus	36.48	72	39.72	70.43
September	70.19	75	54.72	74.26
Oktober	85	80	91.72	78.55
November	95	91	98.72	89.26
Desember	100	96	100	94.11

Berikut ini ilustrasi daya serap keuangan

Grafik 3.1 daya serap keuangan



Catatan Pelaksanaan Revisi Anggaran Tahun 2016

Dalam hal akuntabilitas keuangan terdapat beberapa catatan penting untuk LPMP Propinsi Jawa Timur sepanjang tahun anggaran 2016 yaitu: DIPA mengalami revisi 5 (lima) kali yang perkembangannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Revisi DIPA LPMP Jatim

Unit Utama Pembina: BPSDMPK dan PMP					
Tanggal Revisi	Revisi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Pagu	
				Semula	Menjadi
21 April 2016	Rev.1	023.03.2.419521/2016	07 Desember 2015	135,977,000,000	192,021,244,000
01 Juni 2016	Rev.2	023.03.2.419521/2016	07 Desember 2015	192,021,244,000	192,021,244,000
26 Juli 2016	Rev.3	023.03.2.419521/2016	07 Desember 2015	192,021,244,000	183,139,495,000
26 September 2016	Rev.4	023.03.2.419521/2016	07 Desember 2015	183,139,495,000	183,139,495,000
10 November 2016	Rev.5	023.03.2.419521/2016	07 Desember 2015	183,139,495,000	183,139,495,000

Rekap Anggaran Tahun 2016 LPMP Jawa Timur

NO	BAGIAN/BIDANG	ALOKASI	REALISASI		
			31 Desember 2016	% KEU	% FISIK
1	SUBBAG. UMUM	37.059.631.000	35.268.887.871	96	97
2	SI	37.467.136.000	36.262.273.250	97	98
3	PMS	22.310.571.000	15.111.774.100	68	69
4	FPMP	5.868.761.000	5.489.407.400	94	95
	Jumlah	102.706.099.000	92.132.342.621	94	96

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran kinerja LPMP Provinsi Jawa Timur berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yang dideskripsikan dalam dua jenis analisis, yakni analisis pengukuran capaian kinerja organisasi dan pengukuran realisasi anggaran, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja organisasi terukur sebesar 94.11%, yang berarti bahwa sebagian besar program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Ada ketidakterlaksanaan beberapa program/kegiatan disebabkan karena adanya program yang sudah dilaksanakan atau masuk di output yang lain dan pengurusan ijin gedung/bangunan melebihi pagu yang telah ditetapkan.
2. Realisasi anggaran sebesar 94.11% dapat dikatakan sebagai dampak terjadinya selfblocking. Namun pencapaian tersebut juga merupakan persentase optimal dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program/kegiatan di LPMP Provinsi Jawa Timur.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi barometer dalam melaksanakan program-program yang akan dirancang pada tahun-tahun berikutnya dengan lebih baik..

Apabila diperlukan, LPMP Provinsi Jawa Timur akan mengambil langkah-langkah strategis baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin perwujudan tekad dalam melakukan pembangunan pendidikan nasional khususnya di Provinsi Provinsi Jawa Timur.